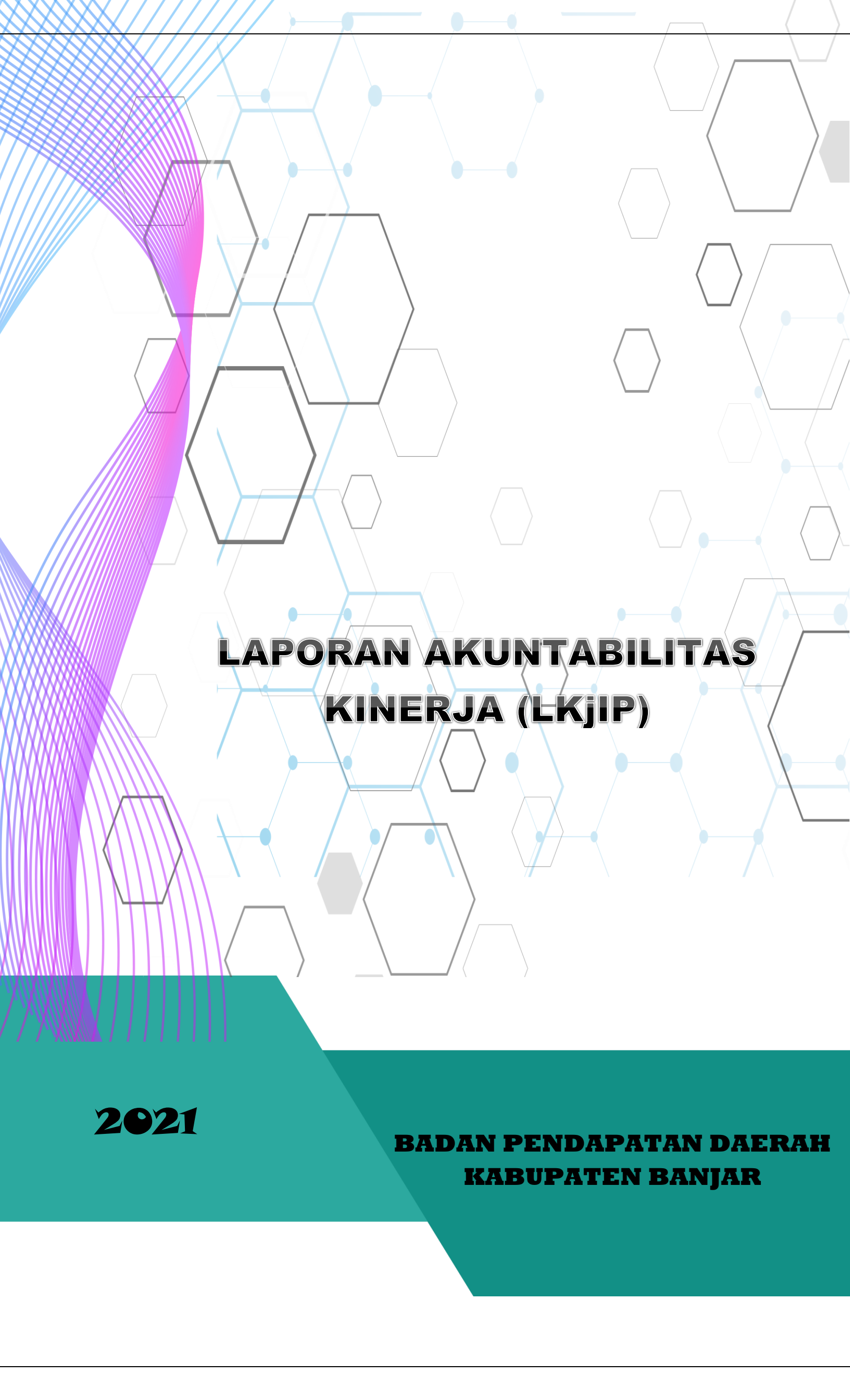


The background features a light gray hexagonal pattern. On the left side, there are vibrant, wavy lines in shades of blue, purple, and pink that flow downwards. The overall design is modern and geometric.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LKjIP)

2021

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 ini dapat diselesaikan tepat waktu. LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar selama tahun 2021 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang berhasil maupun yang belum berhasil dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar beserta analisis capaiannya selama tahun 2021. Secara umum target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai dan akan digunakan sebagai bahan perumusan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Kami berharap agar LKjIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.



Martapura, 31 Desember 2021

Plt. Kepala Badan,

Drs. Achmad Zulyadaini, M.Si

NIP. 19660104 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	6
Ringkasan Eksekutif.....	7
BAB 1 Pendahuluan	10
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	10
A.1 Maksud Laporan	10
A.2 Tujuan Laporan	10
B.TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	10
B.1 Kedudukan.....	12
B.2 Tugas.....	12
B.3 Fungsi	12
C.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	16
D. ISU STRATEGIS	17
E. Sistematika penyajian	19
BAB 2 perencanaan dan perjanjian kinerja	20
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA	20
B.PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB 3 AKuntabilitas Kinerja	34
3.A Capaian Kinerja Organisasi	34
3.A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2021	34
3.A.2 PERBANDINGAN Realisasi dan capaian DENGAN tahun sebelumnya	42
3.A.3 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2021 (akhir periode Renstra)	54
3.A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2020 DAN TARGET PROVINSI	55
3.B. Analisis capaian kinerja sasaran	55

B.1. SASARAN.....	56
3.C. REALISASI ANGGARAN	59
3. C.1 Tindak lanjut atas evaluasi laporan kinerja Tahun 2020	73
3.C.1.1. Evaluasi kinerja Tahun 2020.....	73
BAB IV Penutup	75
4.1. Kesimpulan	75
4.2 Saran-saran	75
Lampiran	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah	17
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	23
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	31
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2021	32
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya	39
Tabel 3.4 Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaan Tahun 2016-2021	45
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Target Periode Akhir (2021)	57
Tabel 3.6 Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD	62
Tabel 3.7 Realisasi Indikator Tahun 2021	63
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	71
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	83
Tabel 3.10 Hasil Evaluasi Kinerja Bapenda	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 16

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2020.....	35
Grafik 2. Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran Program Tahun 2020	35
Grafik 3. Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2020.....	36
Grafik 4. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun2020 Dengan Tahun Sebelumnya Berdasarkan Indikator Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan DaerahJumlah PAD.....	41
Grafik 5. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun2020 Dengan Tahun Sebelumnya Berdasarkan Indikator Jumlah PAD.....	41
Grafik 6. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun2020 Dengan Tahun Sebelumnya Program Kepatuhan Membayar Pajak Daerah Berdasarkan Indikator Jumlah PAD.....	42
Grafik 7. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun2020 Dengan Tahun Sebelumnya Program Akurasi Data PBB Berdasarkan Indikator Jumlah PAD	42
Grafik 8. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun2020 Dengan Tahun Sebelumnya Program Persentase Pemutakhiran Data BPHTB Berdasarkan Indikator Jumlah PAD.....	43
Grafik 9. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun2020 Dengan Tahun Sebelumnya Program Persentase SKPD Pemungut Yang Mencapai Target Retribusi Daerah Berdasarkan Indikator Jumlah PAD.....	43
Grafik 10. Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun2020 Dengan Tahun Sebelumnya Program Persentase Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah Berdasarkan Indikator Jumlah PAD.....	44
Grafik 11. Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target Periode Akhir (2021) menurut Sasaran Strategi	60
Grafik 12. Realisasi Indikator Kinerja Utama.....	60
Grafik 13. Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target Periode Akhir (2021) menurut Sasaran Kegiata.....	61
Grafik 14. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 menurut sasaran strategis	78
Grafik 15. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 menurut Sasaran Program	78
Grafik 16. Penilaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 menurut Sasaran Kegiatan	79
Grafik 17. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	80

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti - bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar 2016 - 2021 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai.

Efektifitas pembangunan di Kabupaten Banjar tidak bisa lepas dari pengelolaan Pendapatan asli daerah (PAD) yang juga merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya, sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi dari daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor penyumbang dalam peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus diakui bahwa untuk APBD Kabupaten Banjar masih tergantung dengan besaran dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih relatif tinggi

Pendapatan daerah dalam hal masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 88,34% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,17%, sementara itu kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 11,49% sebagaimana diagram dibawah ini :



Sumber Data : Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Alur dari permasalahan hal ini merupakan persoalan kita semua. Di satu sisi perlu diupayakan peningkatan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD, pada sisi lain perlu dicari celah–celah yang tidak memberatkan masyarakat.

Respon untuk menjawab kebutuhan akan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar yang nampak dalam kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, melalui:

1. Penyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki;
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah;
4. Penetapan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan serta penghitungan potensi jenis pendapatan asli daerah;
5. Penetapan dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dengan memperhatikan potensi jenis pajak.

Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2021 secara kumulatif mencapai **95,25%** dari target **Rp. 1.731.519.192.929,00** realisasi per 31 Desember 2021 mencapai **Rp.1.649.277.715.901,00** dengan perincian sebagai berikut :

Jenis	Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	212.958.509.185,00	189.574.356.787,00	89,02
Pendapatan Transfer	1.461.360.835.769,00	1.456.934.359.114,00	99,70
Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH	57.199.847.975,00	2.769.000.000,00	4,84
Jumlah	1.731.519.192.929,00	1.649.277.715.901,00	95,25

**Rincian Anggaran yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2021**

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
APBN	-	-	-
APBD (Total Anggaran Belanja)	10.592.007.557,00	9.072.195.506,00	85,65%

Sumber Data : SPJ Pengeluaran Fungsional Desember 2021

BAB 1 PENDAHULUAN**A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN****A.1 Maksud Laporan**

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar;
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar;
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas;
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah kepada Bupati;
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar;
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintah Bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah , maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banjar Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar;
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

B.1 Kedudukan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan.

B.3 Fungsi

Badan Pendapatan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
- b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
- c. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- d. pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Badan;
- e. pengawasan dan pengendalian bidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;

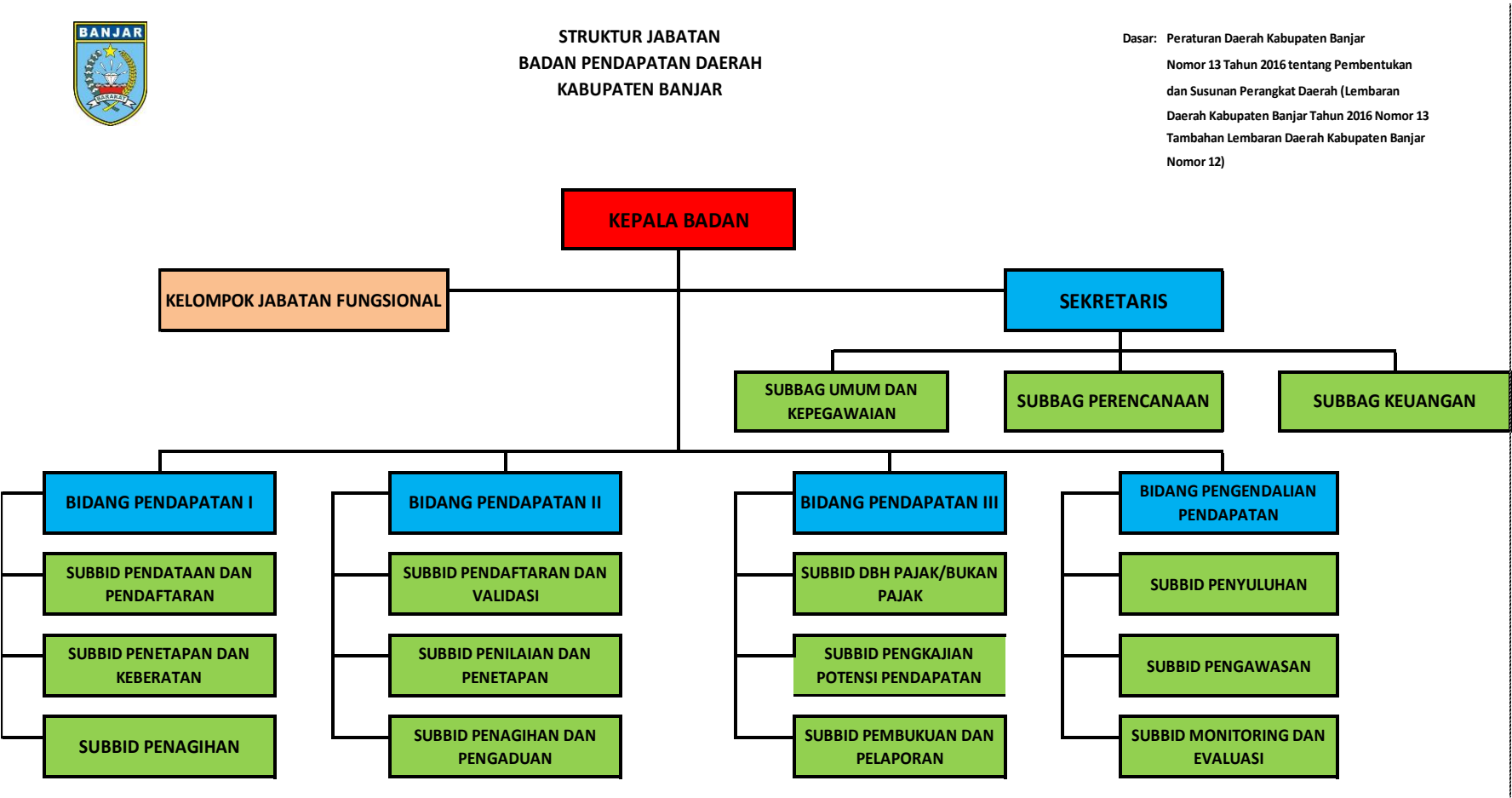
- f. penanggung jawab seluruh kegiatan Badan dan pencapaian sasaran kegiatan Badan;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pendapatan I, pendapatan II, pendapatan III dan pengendalian pendapatan;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis seluruh masyarakat dibidang pendapatan dan pengendalian pendapatan;
- i. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai dilingkungan Badan; dan
- k. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Susunan organisasi SKPD terdiri dari:

- a. Kepala SKPD/Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pendapatan Bidang I
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan dan keberatan; dan
 - 3. Sub Bidang Penagihan.
- d. Bidang Pendapatan II
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran Validasi;
 - 2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan; dan
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Penaguhan.
- e. Bidang Pendapatan III
 - 1. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 2. Sub Bidang Pengkajian Potensi Pendapatan; dan
 - 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- f. Bidang Pengendalian Pendapatan
 - 1. Sub Bidang Pengawasan;
 - 2. Sub Bidang Penyuluhan; dan

- 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar



C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang membantu Kepala Daerah dalam bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Memperhatikan gambaran umum serta data capaian program pada Bapenda Banjar terlihat bahwa langkah kerja Bapenda Banjar untuk mewujudkan harapan di atas **masih rendah kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.**

Identifikasi permasalahan pada pendapatan daerah dilakukan melalui proses analisis pohon masalah kemudian diperoleh *mapping matriks* masalah pokok, masalah dan akar masalah. Sehingga hirarki permasalahan tersusun secara *"cascading"* (berjenjang) dan disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah

NO	MASALAH UTAMA	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan	Rendahnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah masih rendah	Pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan dan mekanisme perhitungan pajak daerah masih terbatas
				Adanya potensi pajak daerah yang masih bisa digali
				Adanya wajib pajak yang belum taat membayar pajak sesuai ketentuan
			Data PBB yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada daerah tidak akurat	Data PBB belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya
				Masyarakat tidak mengetahui besaran pajak PBB yang terhutang
			Harga jual tanah transaksi BPHTB belum mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT)	Tidak adanya lokasi yang mengacu pada Zona Nilai Tanah
				Adanya penambahan wajib pajak BPHTB setiap tahun
			Komitmen	Masih adanya potensi

NO	MASALAH UTAMA	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			dalam pencapaian target retribusi daerah belum terlaksana dengan baik	retribusi daerah yang belum terdata oleh SKPD Pemungut
				Adanya perubahan kebijakan dan regulasi retribusi daerah
				Perlunya data penilaian dan penetapan target retribusi daerah sebagai acuan penetapan Perda APBD
			Data pendapatan daerah belum tersinkronisasi dengan baik	Kurang terbukanya data terkait pendapatan dari perusahaan daerah dan BUMD
				Perubahan data dan informasi terkait peny aluran dan serapan dana transfer tergantung keaktifan daerah
				Sumber data pendapatan daerah dipegang oleh beberapa instansi

Sumber Data : Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2021

D. ISU STRATEGIS

Badan Pendapatan Daerah secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dalam peningkatan kapasitas keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam pencapaian penerimaan pendapatan daerah.

Isu strategis merupakan permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan. Identifikasi isu-isu tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017**, sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategi yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan tahun 2021 mendatang adalah dengan peningkatan kapasitas keuangan daerah, dengan cara :

1. Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah, dengan 4 (empat) arah kebijakan yaitu :
 - a. Peningkatan kepatuhan membayar pajak
 - b. Peningkatan akurasi data pajak daerah
 - c. Penyesuaian harga jual tanah sesuai zona nilai tanah (ZNT)
 - d. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kebijakan adalah arah/tindakan yang akan diambil oleh SKPD dalam mencapai tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk optimalisasi pendapatan daerah dari sumber sumber yang sudah terdata serta pengelolaan keuangan daerah nantinya menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan harus mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Banjar, oleh karenanya seluruh kebijakan baik mengenai pendapatan daerah maupun belanja diarahkan untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan antara lain :

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
2. Mengoptimalkan akurasi data pajak daerah
3. Penyesuaian harga jual tanah sesuai dengan ZNT
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Selain itu juga dilakukan upaya guna mendukung kebijakan tersebut antara lain :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
2. Penyediaan fasilitas kantor pelayanan pajak daerah terpadu;
3. Pengadaan mobil pelayanan PBB keliling;
4. Kerjasama dengan pihak hotel dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran;
5. Kerjasama dengan Kantor Pajak Pratama (KPP) Banjarbaru dan KP2KP Martapura;
6. Kerjasama dengan BPN Kabupaten Banjar dalam pengelolaan PBB dan BPHTB; dan
7. Kerjasama dengan PPAT Wilayah Kabupaten Banjar dalam pengelolaan BPHTB.

E. Sistematika penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), permasalahan serta isu strategis organisasi;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2021 dan Realisasi Anggaran Tahun 2021.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah mengampu misi ke-4 yaitu **“Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif”**. Adapun yang menjadi tujuan misi ke-4 adalah **“Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif”** dengan sasaran **“Terselenggaranya Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah”** serta indikator *persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)*. Sedangkan pada rencana strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang menjadi tujuan adalah **“Terselenggaranya reformasi sumber-sumber pendapatan daerah”** dan sasaran **“Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Periode 2021-2026)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Makna Indikator : Perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah tahun berjalan dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain PAD yang sah	Cara Perhitungan Indikator : $\frac{\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n-1}{\text{Realisasi tahun } n-1} \times 100$	RPJMD
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Periode	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-	Daerah + Retribusi Daerah + Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah + Lain-lain PAD yang sah	RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
			undangan, terdiri atas pajak daerah ,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan , terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah (UU No 33 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah)		

Sumber : Surat Keputusan IKU Bapenda Nomor 204 Tahun 2021

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada perubahan anggaran tahun 2021 terjadi perubahan indikator kinerja utama menjadi Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target 4%. Penyusunan perubahan perjanjian kinerja tahun 2021 mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2021 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja

telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Periode 2016-2021)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(Rp)	212.958.509.185					10.592.007.557	Kepala Badan
	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Periode 2021-2026)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase (%)	4 %						
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran			9.236.212.557	Sekretaris
					1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	1. Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD	Persentase	100	46.737.600	Sekretaris
					a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	a. Jumlah dokumen RKA & DPA SKPD yang disusun sesuai	Dokumen	6	11.632.900	Kasubbag Perencanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6		7		8	9	10	11
									ketentuan dan perubahannya				
						b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	b.	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	3	29.164.300	Kasubbag Perencanaan
						c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	c.	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	30	5.940.400	Kasubbag Perencanaan
						2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi/teknis perkantoran	Persentase	100	7.963.105.046	Sekretaris
						a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	6.778.346.446	Kasubbag Keuangan
						b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	b.	Jumlah petugas kebersihan	Orang	3	1.170.990.000	Kasubbag Keuangan
									Lamanya penyediaan anggaran	Bulan	12		Kasubbag Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
								pendukung administrasi/teknis perkantoran				
								Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasian keuangan	Bulan	12		Kasubbag Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2.668.600	Kasubbag Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	11.100.000	Kasubbag Keuangan
						3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3. Seluruh aparatur lulus dalam mengikuti bimtek/pelatihan	Persentase	100	-	Sekretaris
						a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	a. jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/sejenisn	-	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
							Perundang-Undangan	ya				
						4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4. Persentase nilai indeks kepuasan masyarakat	Persentase	100	293.616.048	Sekretaris
						a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a. Lamanya penyediaan instalasi komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	7.292.600	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						b.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	b. Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	18.395.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						c.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	c. Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	13.344.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	d. Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	Bulan	12	254.584.448	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						daerah				
					5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5. Terpenuhiya layanan administrasi perkantoran	Persentase	97	305.731.700	Sekretaris
					a. Pengadaan Mebel	a. Jumlah pengadaan mebeuleur kantor	Buah	3	44.477.600	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
					b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	b. Jumlah pengadaan peralatan gendung kantor	Buah	27	261.254.100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor				
					6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6. Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Persentase	100	235.747.063	Sekretaris
					a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a. Lamanya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listik	Bulan	12	136.199.863	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN		SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6		7		8	9	10	11
						b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	b.	Lamanya penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	99.547.200	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
									Lamanya penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12		
									Lamanya penyediaan peralatan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12		
						7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Persentase	100	391.275.100	Sekretaris
						a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a.	Lamanya pemeliharaan mobil jabatan	Bulan	12	38.990.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	b.	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang diperpanjang	Buah	36	235.760.000	Kasubbag Umum dan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
							Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	izinnya				Kepegawaian
								Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bulan	12		
						c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	c. Lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	66.025.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	d. Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Kegiatan	1	50.500.100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Data Target Pendapatan Daerah Yang Sinkron			41.307.300	Kepala Badan
						8.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase data transfer yang akurat	Persentase	100	41.307.300	Kepala Bidang Pendapatan III
							Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring	Jumlah rapat dan konsultasi	Laporan	15	41.307.300	Kasubbid Dana Bagi Hasil Pajak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
						dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	terkait dana transfer				dan Bukan Pajak
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah				Kepala Badan
						9. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase	95	1.314.487.700	Kepala Bidang Pendapatan I, Kepala Bidang Pendapatan II, Kepala Bidang Pendapatan III, Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan
						a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah rapat koordinasi terkait hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah	Laporan	19	7.550.600	Kepala Sub Bidang Pengkajian Potensi Pendapatan
						b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak	Orang	250	75.806.000	Kepala Sub Bidang Penyuluhan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
								daerah				
						c.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut	Jenis	85	215.560.800	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
							Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi	WP	135.000	372.243.200	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengaduan
							Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah lokasi yang ditetapkan ZNT	Lokasi	5	9.626.500	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan
								Jumlah BPHTB yang baru	WP	3.300		
							Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi	Dokumen	2	190.172.100	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
							Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih	WP	110.000	113.542.400	Kasubbid Penagihan dan Pengaduan
							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah buku laporan pendapatan daerah yang disusun	Dokumen	16	52.491.300	Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan
							Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah yang bisa ditagih	Juta	450.000.000	215.414.500	Kasubbid Penagihan
							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi	WP	200	39.498.500	Kasubbid Pengawasan
							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun	Laporan	10	22.581.800	Kasubbid Monitoring dan EValuasi

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja 2021

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2021

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2021.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja subkegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja subkegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realiasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 100\%$	Berhasil	Hijau Tua
2	$70\% < 100\%$	Cukup Berhasil	Biru
3	$40\% < 70\%$	Kurang Berhasil	Kuning
4	$10\% < 40\%$	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Periode 2016-2021)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Daerah + Retribusi Daerah + Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah + Lain-lain PAD yang sah	(Rp)	212.958.509.185	216.995.746.019	101,90	Berhasil
Optimalisasi Penerimaan PAD (Periode 2021-2026)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Realisasi tahun n} - \text{Realisasi tahun n-1}}{\text{Realisasi tahun n-1}} \times 100\%$	(%)	4		5,22	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100$	%	95	95,33	103,62	Berhasil
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi PAD	%	95	89,02	93,71	Cukup Berhasil
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah rapat koordinasi terkait hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Laporan	19	16 Laporan	84,21	Cukup Berhasil
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Wajib Pajak	250	250 wajib Pajak	100,00	Berhasil

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Jenis	85	75 Jenis	88,24	Cukup Berhasil
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	WP	135.000	174.857 WP	129,52%	Berhasil
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah lokasi yang ditetapkan ZNT	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Lokasi	5	5 Lokasi	100,00	Berhasil
	Jumlah BPHTB yang baru	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	WP	3.300	4.530 WP	137,27	Berhasil
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Dokumen	2	2 Dok	100,00	Berhasil
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	WP	110.000	92.322 WP	83,93	Cukup Berhasil
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah buku laporan pendapatan daerah yang disusun	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Dokumen	16	16 Dokumen	100,00	Berhasil

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2021			
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah yang bisa ditagih	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Rp	450.000.000	Rp. 544.706.116	121,05	Berhasil
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	WP	200	202 WP	101,00	Berhasil
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$	Laporan	10	10 Laporan	100,00	Berhasil

Sumber : Laporan Kinerja Bapenda Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas pada sasaran strategi Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Cara perhitungannya adalah Daerah + Retribusi Daerah + Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah + Lain-lain PAD yang sah dan sasaran strategi Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) . Cara perhitungannya adalah realisasi tahun n – realisasi tahun (n-1) dibandingkan dengan realisasi tahun n-1 dikalikan dengan 100%.

Pendapatan asli daerah adalah pajak daerah + retribusi daerah + bagi hasil laba perusahaan daerah + lain-lain PAD yang sah dengan target Rp. 212.958.509.185,00. Pada 31 Desember 2021 diperoleh realisasi Rp. 216.995.746.019,00 yang terdiri dari realisasi pajak daerah Rp. 80.986.518.673,00, atau 114,39%, retribusi daerah Rp. 5.785.761.320,00, atau 83,59%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 5.596.447.089,00 atau 24,61% dan lain-lain PAD yang sah Rp. 124.627.018.937,00 atau 110,78%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) untuk Periode 2016-2021 pada Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 mencapai 101,90% dari target 212.958.509.185,00 dan capaian indikator kinerja utama (IKU) untuk Periode 2021-2026 mencapai 5,22% dari target 4%. Sebagaimana tabel capaian realisasi pendapatan tahun 2021 seperti berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banjar
Tahun 2021

No.	Jenis Pungutan	Target 2021	Realisasi Tahun 2021	(Kurang)/Lebih	%
	Pendapatan Asli Daerah	212.958.509.185	216.995.746.019	4.037.236.834	101,90
I	Pajak Daerah	70.800.000.000	80.986.518.673	10.186.518.673	114,39
1.	Pajak Hotel	3.300.000.000	3.845.090.074	545.090.074	116,52
2.	Pajak Restoran	6.150.000.000	8.353.551.395	2.203.551.395	135,83
3.	Pajak Hiburan	250.000.000	74.257.656	- 175.742.344	29,70
4.	Pajak Reklame	2.000.000.000	2.122.380.842	122.380.842	106,12
5.	Pajak Penerangan Jalan	24.000.000.000	25.443.428.218	1.443.428.218	106,01
6.	Pajak Parkir	720.000.000	732.583.701	12.583.701	101,75
7.	Pajak Air Tanah	140.000.000	231.859.464	91.859.464	165,61
8.	Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000	24.607.800	- 15.392.200	61,52
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.200.000.000	1.959.821.720	- 240.178.280	89,08
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	7.000.000.000	7.637.501.530	637.501.530	109,11
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	25.000.000.000	30.561.436.273	5.561.436.273	122,25
II.	Retribusi Daerah	6.921.706.174	5.785.761.320	- 1.135.944.854	83,59
1.	Retribusi Jasa Umum	1.504.650.000	1.698.105.500	193.455.500	112,86

2.	Retribusi Jasa Usaha	2.246.306.174	892.311.493	- 1.353.994.681	39,72
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.170.750.000	3.195.344.327	24.594.327	100,78
III.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.740.580.338	5.596.447.089	-17.144.133.249	24,61
IV.	Lain-Lain PAD yang Sah	112.496.222.673	124.627.018.937	12.130.796.264	110,78

Sumber Data : Subbid Pembukuan dan Pelaporan (05 Januari 2022) – Data masih bisa berubah

3.A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari kinerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/*trend* meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Persentase capaian penerimaan pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Daerah dibagi Target Pendapatan Daerah dikali 100	Persen (%)	96,14	99,11	97,46	95,51	103,52	100	Tidak Menjadi Indikator					
2.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah + Lain-lain PAD yang sah	Rupiah (Rp)	BAPENDA KAB BANJAR						223.201.382.687	119	206.237.506.290	113,99	216.995.746.019	101,90
	Persentase kepatuhan membayar pajak daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang patuh (9 jenis pajak daerah) dibagi seluruh jumlah wajib pajak daerah (9 jenis pajak daerah) dikali 100	%	BAPENDA KAB BANJAR						95,40	106	95,33	103,62	Tidak Menjadi Indikator lagi	
	Persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Realisasi penerimaan PBB dibagi target dikali 100	%	BAPENDA KAB BANJAR						100,12	100,12	94,68	94,68	Tidak Menjadi Indikator lagi	

	Persentase capaian penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Realisasi penerimaan BPHTB dibagi target dikali 100	%	BAPENDA KAB BANJAR	129,91	129,91	167.42	167.42	Tidak Menjadi Indikator lagi	
	Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah	Jumlah SKPD Pemungut yang mencapai target retribusi daerah dibagi jumlah seluruh SKPD Pemungut dikali 100	%	BAPENDA KAB BANJAR	100	142,85	61.54	76.25	Tidak Menjadi Indikator lagi	
	Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron	Data penetapan yang tercapai dibagi data target dikali 100	%	BAPENDA KAB BANJAR	95,15	100.15	95,43	98.39	Tidak Menjadi Indikator lagi	
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi tahun n di kurang realisasi tahun n minus 1 di bagi realisasi tahun n minus 1 di kali 100	%	BAPENDA KAB BANJAR					216.995.746.019	5,22
	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi PAD di bagi Target PAD di kali 100	%	BAPENDA KAB BANJAR					216.995.746.019	101,90

Sumber Data : SK IKU Perubahan 2021 dan Subbid Pembukuan dan Pelaporan

Realisasi/capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan indikator persentase capaian penerimaan pendapatan daerah, pada tahun 2016 realisasi Keuangan 96,14% dengan capaian kinerja 99,11%, tahun 2017 realisasi keuangan 97,46% dengan capaian kinerja 95,51%, tahun 2018 dengan realisasi keuangan 103,52% dengan capaian kinerja 100%, pada tahun 2019 adanya perubahan RPJMD sehingga indikator Badan Pendapatan Daerah juga mengalami perubahan menjadi jumlah pendapatan daerah (PAD) dengan realisasi pendapatan 223.201.382.687,00 dan capaian kinerja 119% pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan dengan realisasi 206.237.506.290,00 dengan capaian kinerja 113,99%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan turunnya daya perekonomian Kabupaten Banjar. Pada perubahan anggaran tahun 2022, indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah mengalami perubahan menjadi persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target setiap tahunnya 4%. Data pendapatan saat ini masih terus mengalami perubahan karena ada dana masuk melalui bank namun belum diketahui dana tersebut masuk ke rekening mana, masih dalam proses konfirmasi dengan wajib pajak. Hingga 05 Januari 2022 realisasi pendapatan asli daerah mencapai Rp. 216.995.746.019,00 atau 101,90% dari target Rp. 212.958.509.185,00 dengan perhitungan indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah mencapai 5,22% dari target 4%.

Tabel 3.4
Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaanya Tahun 2021-2026

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
									Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(4)					(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terselenggara nya Reformasi sumber-sumber pendapatan daerah	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah							Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4%	12.777.935.332	4%	6.260.627.850	4%	7.058.625.325	4%	6.010.371.416	4%	6.862.640.363	4%	6.862.640.363		
	Meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	5	2	4			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94%	1.811.545.900	95%	2.783.785.077	96%	3.014.015.169	98%	3.188.242.720	100%	3.603.299.968	100%	3.603.299.968		Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya capaian pajak daerah	5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian pajak daerah	94%	1.811.545.900	95%	2.783.785.077	96%	3.014.015.169	98%	3.188.242.720	100%	3.603.299.968	100%	3.603.299.968		Bapenda Kab.Banjar
								Persentase capaian retribusi daerah	80%		82%		85%		98%		100%		100%			
								Persentase Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan														
								Persentase Lain-Lain PAD yang Sah														
	Meningkatnya perencanaan pengelolaan pajak daerah	5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	jumlah target pendapatan daerah yang disusun	2 Dokumen	22.883.100	2 Dokumen	24.027.255	2 Dokumen	25.228.618	2 Dokumen	26.490.049	2 Dokumen	27.814.552	2 Dokumen	27.814.552		Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	jumlah dokumen terkait kebijakan pajak daerah	2 Dokumen	7.550.600	2 Dokumen	159.826.900	3 Dokumen	191.865.800	3 Dokumen	150.237.250	3 Dokumen	164.013.000	3 Dokumen	164.013.000	Bidang Pendapatan III	Bapenda Kab.Banjar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

	Meningkatnya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta penyuluhan yang paham terkait materi penyuluhan	225 Orang	89.640.200	225 Orang	159.012.210	225 Orang	166.584.220	250 Orang	174.156.230	250 Orang	181.728.240	250 Orang	181.728.240	Bidang Penguatan Pendapatan	Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	11 Buah	179.602.500	9 Buah	197.562.750	9 Buah	217.319.025	9 Buah	239.050.928	8 Buah	262.956.020	8 Buah	262.956.020		Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	jumlah objek pajak daerah per jenis pajak yang terdata dan terdaftar	176.975 Objek Pajak	111.592.800	180.000 Objek Pajak	122.752.080	182.500 Objek Pajak	135.027.288	185.000 Objek Pajak	148.530.017	187.500 Objek Pajak	331.344.523	187.500 Objek Pajak	331.344.523	Bidang Pendapatan I	Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah laporan atas pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	4 Laporan	58.539.900	4 Laporan	58.539.900	4 Laporan	58.539.900	4 Laporan	58.539.900	4 Laporan	58.539.900	4 Laporan	58.539.900	Bidang Pendapatan II	Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	jumlah wajib pajak PBB dan BPHTB yang dinilai	3300 WP	130.687.000	3500 WP	574.615.335	4000 WP	603.346.101	4500 WP	633.511.405	5000 WP	665.186.974	5000 WP	665.186.974	Bidang Pendapatan II	Bapenda Kab.Banjar
								jumlah wajib pajak PBB yang dimutakhirkan	5000 WP		5150 WP		5350 WP		5500 WP		5650 WP		5650 WP		Bidang Pendapatan II	Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya penetapan wajib pajak daerah	5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	750 SKPD	16.601.300	800 SKPD, 20 Buku DHKP	138.737.573	850 SKPD, 20 Buku DHKP	146.678.830	900 SKPD, 20 Buku DHKP	155.117.588	950 SKPD, 20 Buku DHKP	164.089.060	950 SKPD, 20 Buku DHKP	164.089.060	Bidang Pendapatan I	Bapenda Kab.Banjar
								Jumlah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang diterbitkan	20 Buku DHKP													
	Meningkatnya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	jumlah wajib pajak daerah yang dilayani dan melakukan konsultasi pajak daerah	120 Wajib Pajak	17.143.100	126 Wajib Pajak	18.857.410	132 Wajib Pajak	20.743.151	138 Wajib Pajak	22.817.466	144 Wajib Pajak	25.099.213	144 Wajib Pajak	25.099.213	Bidang Pendapatan II	Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya penelitian dan verifikasi data	5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan	Jumlah buku dan laporan pendaparan	16 Dokumen	61.225.600	16 Dokumen	67.348.160	16 Dokumen	74.082.976	16 Dokumen	81.491.274	16 Dokumen	89.640.400	16 Dokumen	89.640.400	Bidang Pendapatan III	Bapenda Kab.Banjar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

	pelaporan pajak daerah						Pajak Daerah	daerah yang disusun														
	Meningkatnya penagihan pajak daerah	5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diterbitkan	STPD 75 Lembar	917.682.500	STPD 70 Lembar	1.009.450.750	STPD 65 Lembar	1.110.395.825	STPD 60 Lembar	1.221.435.408	STPD 55 Lembar	1.343.578.948	STPD 55 Lembar	1.343.578.948	Bidang Pendapatan I	Bapenda Kab.Banjar
								Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diterbitkan	SPPT 175.000 lembar		SPPT 176.000 Lembar		SPPT 177.000 Lembar		SPPT 178.000 Lembar		SPPT 179.000 Lembar					
	Meningkatnya penyelesaian keberatan pajak daerah	5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	jumlah keberatan dari wajib pajak daerah yang bisa diselesaikan	120 Kasus	12.897.100	126 Kasus	14.186.810	132 Kasus	15.605.491	138 Kasus	17.166.040	144 Kasus	18.882.644	144 Kasus	18.882.644		Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	jumlah wajib pajak daerah yang diawasi	160 Wajib Pajak	141.748.000	170 WP	194.600.700	180 WP	204.330.700	190 WP	214.546.577	200 WP	225.273.905	200 WP	225.273.905	Bidang Pengendalian Pendapatan	Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan dan evaluasi retribusi daerah	4 Laporan	43.752.200	4 Laporan	44.267.244	4 Laporan	44.267.244	4 Laporan	45.152.589	4 Laporan	45.152.589	4 Laporan	45.152.589	Bidang Pengendalian Pendapatan	Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	5	2	2			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian target Dana Transfer dengan realisasi	94%	31.307.300	96%	235.350.414	98%	222.629.750	100%	248.072.800	100%	260.793.700	100%	260.793.700		Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya koordinasi dana transfer	5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase kesesuaian target DBH Pajak	94%	31.307.300	96%	235.350.414	98%	222.629.750	100%	248.072.800	100%	260.793.700	100%	260.793.700		Bapenda Kab.Banjar
								Persentase kesesuaian target DBH Non Pajak	94%		96%		98%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan	5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Jumlah laporan koordinasi, fasilitasi,asistensi sinkronisasi, supervisi, monev pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	7 laporan	31.307.300	9 Laporan	235.350.414	12 Laporan	222.629.750	12 Laporan	248.072.800	12 Laporan	260.793.700	12 Laporan	260.793.700	Bidang Pendapatan III	Bapenda Kab.Banjar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

	dan dana transfer lainnya						Transfer Lainnya														
	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	5	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	10.935.082.132		3.241.492.359		3.821.980.406		2.574.055.896		2.998.546.694		2.998.546.694	
	Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	2	1	2.01		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	37.810.405	100%	37.810.405	100%	37.810.405	100%	37.810.405	100%	37.810.405	100%	37.810.405	Bapenda Kab.Banjar
	Meningkatnya penyusunan dookumen perencanaan perangkat daerah	5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.481.800	9 Dokumen	7.481.800	10 Dokumen	7.481.800	9 Dokumen	7.481.800	9 Dokumen	7.481.800	9 Dokumen	7.481.800	Kasubb ag Perencanaan
	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.550.400	1 Dokumen	5.550.400	1 Dokumen	5.550.400	1 Dokumen	5.550.400	1 Dokumen	5.550.400	1 Dokumen	5.550.400	Kasubb ag Perencanaan
	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.997.000	2 Dokumen	4.997.000	2 Dokumen	4.997.000	2 Dokumen	4.997.000	2 Dokumen	4.997.000	2 Dokumen	4.997.000	Kasubb ag Perencanaan
	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	5	2		2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.696.900	1 Dokumen	6.696.900	1 Dokumen	6.696.900	1 Dokumen	6.696.900	1 Dokumen	6.696.900	1 Dokumen	6.696.900	Kasubb ag Perencanaan
	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.162.100	2 Dokumen	5.162.100	2 Dokumen	5.162.100	2 Dokumen	5.162.100	2 Dokumen	5.162.100	2 Dokumen	5.162.100	Kasubb ag Perencanaan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Lapora n	4.273.100	16 Dokum en	4.273.100	3 Doku men	4.273.100	3 Dokum en	4.273.10 0	3 Doku men	4.273.100	3 Dokum en	4.273.100	Kasubb ag Perenc anaan	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya ketepatan penyusunan evaluasi kinerja	5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Lapora n	3.649.105	56 Dokum en	3.649.105	56 Doku men	3.649.105	56 Dokum en	3.649.10 5	56 Doku men	3.649.105	56 Dokum en	3.649.105	Kasubb ag Perenc anaan	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	8.424.685.9 32	100	105.433.53 0	100	1.221.205 .207	100	107.445. 967	100	108.528.26 5	100	108.528.26 5		Bapenda Kab.Ban jar
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai	5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah masa waktu terlaksananya belanja gaji dan TPP	14 Bulan	8.320.187.3 32	14 Bulan		14 Bulan		14 Bulan		14 Bula n		14 Bula n		Kasubb ag Keuang an	Bapenda Kab.Ban jar
	Terbayarnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Verifikasi Keuangan	2 Lapora n	90.700.000	12 Lapora n	90.700.000	12 Lapor an	90.700.00 0	12 Lapora n	90.700.0 00	12 Lapor an	90.700.000	12 Lapo ran	90.700.000	Kasubb ag Keuang an	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Lapora n	2.668.600	2 Lapora n	2.802.030	2 Lapor an	2.942.131 ,5	2 Lapora n	3.089.23 8,08	2 Lapor an	3.243.699,9 8	2 Lapo ran	3.243.699, 98	Kasubb ag Keuang an	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran yang tersusun	18 Lapora n	11.130.000	16 Lapora n	11.931.500	16 Lapor an	12.773.07 5	16 Lapora n	13.656.7 28,8	16 Lapor an	14.584.565, 2	16 Lapo ran	14.584.565 ,2	Kasubb ag Keuang an	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	62.000.000	100%	85.000.000	100%	110.000.0 00	100%	110.000. 000	100%	110.000.00 0	100 %	110.000.00 0		Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	5	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja	12 Lapora n	10.000.000	12 Lapora n	10.000.000	12 Lapor an	10.000.00 0	12 Lapora n	10.000.0 00	12 Lapor an	10.000.000	12 Lapo ran	10.000.000	Kasubb ag Umum dan	Bapenda Kab.Ban jar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

	Pegawai						Pegawai	pegawai yang tersusun													Kepega waian	
	Meningkatnya kualitas SDM	5	2	1	2.02	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang meningkat dan kompetensinya	5 Orang	52.000.000	7 Orang	75.000.000	10 Orang	100.000.0 00	10 Orang	100.000. 000	10 Orang	100.000.00 0	10 Oran g	100.000.00 0	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya administrasi umum perangkat daerah	5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	267.166.90 0	100%	281.000.00 0	100%	332.500.0 00	100%	334.000. 000	100%	384.000.00 0	100 %	384.000.00 0		Bapenda Kab.Ban jar
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan penerangan kantor	115 buah	7.292.600	115 buah	8.000.000	115 buah	8.500.000	115 buah	9.000.00 0	115 buah	9.000.000	12 Bula n	9.000.000	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5	2	1	2.06	5	Penyampaian Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	6.530.300	12 Bulan	19.000.000	12 Bulan	19.500.00 0	12 Bulan	20.000.0 00	12 Bulan	20.000.000	12 Bula n	20.000.000	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	13.344.000	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	14.500.00 0	12 Bulan	15.000.0 00	12 Bulan	15.000.000	12 Bula n	15.000.000	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5	2	1	2.06	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	240.000.00 0	12 Bulan	240.000.00 0	12 Bulan	290.000.0 00	12 Bulan	290.000. 000	12 Bulan	340.000.00 0	12 Bula n	340.000.00 0	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah	5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	392.039.67 1	100%	981.369.30 0	100%	369.585.6 70	100%	233.920. 400	100%	607.328.90 0	100 %	607.328.90 0		Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya kualitas kendaraan dinas operasional atau lapangan	5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional/lapang an	1 Unit	233.055.37 1	2 Buah	600.000.00 0	3 Buah	84.000.00 0	0	-	-	-	-	-	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

	Meningkatnya ketersediaan mebel kantor	5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebeuleur kantor	4 Buah	64.477.600	14 Buah	74.382.000	15 Buah	30.873.270	4 Buah	6.500.000	13 Buah	18.294.000	13 Buah	18.294.000	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor	5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	6 Buah	94.506.700	51 Buah	306.987.300	34 Buah	254.712.400	21 Buah	227.420.400	50 Buah	589.034.900	50 Buah	589.034.900	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang kantor	5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.342.244.124	100%	1.342.244.124	100%	1.342.244.124	100%	1.342.244.124	100%	1.342.244.124	100%	1.342.244.124		Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 Bulan	181.800.524	12 Bulan	181.800.524	12 Bulan	181.800.524	12 Bulan	181.800.524	12 Bulan	181.800.524	12 Bula n	181.800.524	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	12 Bulan	1.160.443.600	12 Bulan	1.160.443.600	12 Bulan	1.160.443.600	12 Bulan	1.160.443.600	12 Bulan	1.160.443.600	12 Bula n	1.160.443.600	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya kualitas barang milik daerah	5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	409.135.100	100%	408.635.000	100%	408.635.000	100%	408.635.000	100%	408.635.000	100%	408.635.000		Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya ketersediaan jasa pemeliharaa, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik	1 Unit	38.990.000	1 Unit	38.990.000	1 Unit	38.990.000	1 Unit	38.990.000	1 Unit	38.990.000	1 Unit	38.990.000	Kasubb ag Umum dan Kepega waian	Bapenda Kab.Ban jar
	Meningkatnya ketersediaan jasa pemeliharaa,	5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	33 Unit	257.760.000	25 Unit	257.760.000	25 Unit	257.760.000	25 Unit	257.760.000	25 Unit	257.760.000	25 Unit	257.760.000	Kasubb ag Umum dan	Bapenda Kab.Ban jar

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

	biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan						Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														Kepegawaian	
	Meningkatnya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor	12 Bulan	61.885.000	12 Bulan	61.885.000	12 Bulan	61.885.000	12 Bulan	61.885.000	12 Bulan	61.885.000	12 Bulan	61.885.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda Kab.Banj
	Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor	5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan dalam kondisi baik	1 Kegiatan	50.500.100	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Bapenda Kab.Banj

Sumber Data : Matriks Renstra 2021 – 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar

3.A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2021 (AKHIR PERIODE RENSTRA)

Indikator kinerja sasaran tahun 2021 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perubahan renstra periode tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun 2021 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2021, untuk mengetahui kemampuan Badan pendapatan Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2021 akhir renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Target Periode Akhir (2021)

Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Periode Awal Renstra (2021)	Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Optimalisasi Penerimaan PAD/ Meningkatnya pengelolaan PAD	Persentase Peningkatan PAD	Realisasi tahun n di kurang realisasi tahun n minus 1 di bagi realisasi tahun n minus 1 di kali 100	%	5,22	4 %	4%
Pengelolaan Pendapatan Daerah (program)	Persentase capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi pendapatan asli daerah dibagi target realisasi pendapatan asli daerah di kali 100	%	101,90%	94%	100%
Pengelolaan Pendapatan Daerah (Kegiatan)	Persentase Capaian pajak daerah	Realisasi capaian pajak daerah di bagi target pajak daerah di kali 100	%	114,39%	94%	100%
	Persentase Capaian retribusi daerah	Realisasi capaian retribusi daerah di bagi target retribusi daerah di kali 100	%	83,59%	90%	100%
	Persentase Capaian bagi hasil perusda	Realisasi capaian bagi hasil perusda di bagi target bagi hasil perusda di kali 100	%	24,61%	90%	100%
	Persentase Capaian lain-lain PAD yang sah	Realisasi capaian lain-lain PAD yang sah di bagi target lain-lain PAD yang sah di kali 100	%	110,78%	90%	100%

Sumber Data : Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026, Laporan Fisik dan Keuangan ub.Desember 2021

Pencapaian kinerja tahun 2021 menuju target akhir periode 2021 dengan realisasi 205.887.223.855,00 dan target diakhir periode 192.000.000.000,00 menunjukkan capaian kinerja Bapenda yang baik walaupun sedikit penurunan dari capaian tahun sebelum nya sebesar 216.995.746.019,00 atau 5,22% dikarena pandemi covid dan *social distancing* yang berdampak terhadap perekonomian dan Kabupaten Banjar.

3.A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2021 DAN TARGET PROVINSI

Sebagai bahan perbandingan dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, indikator kinerja dan target kinerja Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016 – 2021. Adapun indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6

Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya pendanaan daerah	Persentase Kemandirian Fiskal
			Jumlah SKPD dengan realisasi Belanja 86 %
			Jumlah Laporan Keuangan sesuai SAP
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel

Sumber Data : RPJMD Provinsi Kalsel

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016 – 2021 yang menjadi tujuan Badan Keuangan Daerah adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran Meningkatnya Pendanaan Daerah. Adapun indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yaitu :

- 1. Persentase Kemandirian Fiskal
- 2. Jumlah SKPD dengan realisasi belanja ≥ 86 %
- 3. Jumlah laporan keuangan sesuai SAP
- 4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel

Sedangkan yang menjadi sasaran strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja utama yaitu Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga tidak diperoleh kesamaan indikator kinerja antara Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.

3.B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

B.1. SASARAN

Sasaran strategis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yaitu **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD)”**.

Hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sangat berhasil, pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Periode 2021-2026)	4 %	216.995.746.019	5,22%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Periode 2016-2021)	212.958.509.185	216.995.746.019	101,90%

Sumber Data : Laporan Rekapitulasi Pendapatan per 31 Desember 2021

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1) Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi *outcome* dan dibuat secara berjenjang (*cascading*) sampai ke eselon terendah;
- 2) Seluruh indikator telah dilengkapi dengan *baseline* data dan cara penghitungannya;
- 3) Diberlakukannya sistem pajak online; dan
- 4) Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

Faktor penghambat pencapaian sasaran ini adalah :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah masih rendah;
- 2) Data PBB yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada daerah tidak akurat;
- 3) Harga jual tanah transaksi BPHTB belum mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT);
- 4) Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah belum terlaksana dengan baik;
- 5) Data pendapatan daerah belum tersinkronisasi dengan baik;
- 6) Kegiatan secara face to face tidak terlaksana akibat covid-19; dan
- 7) Karna adanya pengurangan anggaran atau rasionalisasi anggran.

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

- 1) Masih adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun masih dalam rentang “cukup berhasil”, yaitu program program pencapaian target retribusi daerah dikarenakan adanya SKPD pemungut yang menetapkan target namun tidak melakukan pungutan.

Upaya perbaikan :

- 1) Mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target, yaitu Program pencapaian target retribusi daerah masih dibawah nilai 100 dengan adanya forum SKPD pemungut sehingga mudah dalam penyampaian informasi.

Sedangkan untuk faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan pada program dan kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 20,77% dan realisasi pada triwulan IV tercapai sebesar 99,54% dengan predikat Berhasil.

Faktor pendukung pada program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu :

- Tersedianya anggaran sehingga bisa memenuhi kebutuhan rutin SKPD;
- Adanya kerjasama antara sekretariat dengan bidang dalam pemenuhan tugas rutin;
- Adanya aplikasi SIPD dan SIMDA dalam penerapan perencanaan dan penatausahaan keuangan.

Yang menjadi faktor penghambatnya adalah :

- Adanya *refocusing* anggaran sehingga kegiatan pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan tidak terlaksana pada tahun 2021;
- Beberapa peralatan dan mesin rusak berat, tidak bisa diperbaiki lagi, hal tersebut merupakan faktor penghambat pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD karena adanya penggunaan 2 (dua) aplikasi yang berbeda yaitu SIMDA dan SIPD menyebabkan adanya ketidaksinkronan data;
- Keterlambatan bidang dalam menyampaikan bahan laporan kinerja sehingga terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- Data masih sering berubah sehingga penyusunan laporan keuangan baik akhir tahun maupun bulanan/triwulanan/semesteran terhambat.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pengelolaan keuangan daerah dengan target 6,67% dan realisasi pada triwulan IV tercapai sebesar 13,33%.

Faktor pendukung pada program pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- Meningkatnya jalinan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan pihak perpajakan dalam hal optimalisasi penerimaan pajak-pajak pusat;
- Terbitnya surat himbauan kepada pelaku usaha yang ada di Kab. Banjar untuk membuat NPWP Cabang;
- Meningkatnya kegiatan ekstensifikasi pajak pusat dan optimalisasi kegiatan canvassing kepada para pelaku usaha industri Perhutanan, Pertambangan dan Perkebunan oleh KPP Pratama Banjarbaru dan KP2KP Martapura yang melibatkan Bapenda;
- Terlaksananya validasi data 6 (enam) buah IUPPKH dan pemerataan di Kab. Banjar oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalsel
- Terjalinnnya kerjasama dengan UPPD SAMSAT Martapura untuk pertukaran informasi dan data serta menyusun program pelaksanaan kegiatan terpadu;
- Terbitnya Peraturan Gubernur Kalsel No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Nilai Penggunaan Air Permukaan.

Faktor penghambat pada program pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- Masih adanya pandemik covid 19 yang mengurangi permintaan atas pasokan bahan tambang baik pasar ekspor maupun domestik;
- Sulitnya pihak pajak mendapatkan data kontak perusahaan di wilayah Kab. Banjar dikarenakan pihak perusahaan dan wajib pajak perseorangan lebih segan dan kooperatif kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dibanding terhadap pihak pajak pusat;
- Terlambatnya penyampaian laporan atas kegiatan fisik dari SKPD, sehingga pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun regular tertunda;
- Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kendaraan bermotor yang tercatat dalam wilayah

Kab.Banjar/Kalsel dipindahkan ke propinsi lain yang tidak menerapkan pajak progresif;

- Kendala jarak yang jauh dan wajib pajak merasa dipersulit dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan di UPPD SAMSAT Martapura.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program pengelolaan pendapatan daerah dengan target 23,75% dan realisasi pada triwulan IV tercapai sebesar 127,78%.

Faktor pendukung program pengelolaan pendapatan daerah yaitu :

- Adanya aplikasi berbasis online;
- Adanya koordinasi yang baik antar bidang dalam SKPD;
- Adanya koordinasi dengan SKPD terlibat dan pihak ketiga dalam proses pengelolaan pendapatan daerah seperti notaris dan wajib pajak.
- Dukungan dari Bank Kalsel dan kerja sama dengan Vendor (pemasangan alat perekam data transaksi).

Faktor penghambat program pengelolaan pendapatan daerah yaitu :

- Pemberlakuan PPKM di Kab.Banjar hingga level 3 pada Bulan Maret-September 2021 sehingga koordinasi ke perusahaan daerah dan instansi lain tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
- Kesadaran wajib pajak masih kurang dalam membayar pajak;
- Adanya data yang sudah masuk ke Kas Daerah tapi sumbernya tidak jelas;

3.C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 9.072.195.506,-** (85,65 %).

Realisasi anggaran belanja untuk program prioritas sebesar Rp. 907.140.780,00 (69,01%) dari total anggaran yang dilokasikan untuk program prioritas sebesar Rp. 1.314.487.700,00. Sedangkan realisasi anggaran belanja program pendukung sebesar Rp. 8.165.054.726,00 (88,01%) dari total anggaran yang dilokasikan untuk program pendukung sebesar Rp. 9.277.519.857,00 .

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 %	5,22%	130,50%	10.592.007.557	9.072.195.506	85%
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94%	101,90%	108,40%	1.314.487.700	907.140.780	69,01%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	94%	101,90%	108,40%	1.314.487.700	907.140.780	69,01%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah rapat koordinasi terkait hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah	19 Laporan	16 Laporan	84,21%	7.550.600	3.598.100	47,65%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak	250 Orang	250 Orang	100 %	75.806.000	70.206.000	92,61%

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
		daerah						
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut	85 Jenis	75 Jenis	88,24 %	215.560.800	189.616.800	87,96%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi	135.000 WP	174.857 WP	129,52%	372.243.200	112.224.900	30,19%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah lokasi yang ditetapkan ZNT	5 Lokasi	5 Lokasi	100 %	9.626.500	8.369.800	86,95%
		Jumlah BPHTB yang baru	3.300 WP	4.530 WP	137,27%			
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	190.172.100	185.573.500	98,11%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih	110.000 WP	92.322 WP	83,93%	113.542.400	25.586.180	22,53%
	Penelitian dan	Jumlah buku	16	16	100%	52.491.300	52.491.300	100%

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	laporan pendapatan daerah yang disusun	Dokumen	Dokumen				
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah yang bisa ditagih	450.000 .000 Juta	544.706.1 16 Juta	121,05%	215.414.500	207.993.900	96,56%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi	200 WP	202 WP	101%	39.498.500	31.798.500	80,51%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun	10 Laporan	10 Laporan	100%	22.581.800	18.681.800	82,73%
	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron	95 %	113,33 %	118,94%	41.307.300	33.882.300	82,02%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase data dana transfer yang akurat	95 %	113,33 %	118,94%	41.307.300	33.882.300	82,02%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah rapat koordinsi dan konsultasi terkait dana transfer	15 Laporan	19 Laporan	126,67 %	41.307.300	33.882.300	82,02%

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	101,35%	101,35 %	9.236.212.557	8.131.172.426	88,04%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja SKPD	100 %	105,13 %	105,13 %	46.737.600	11.861.050	25,38%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA & DPA SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan perubahannya	6 dokumen	6 dokumen	100 %	11.632.900	6.341.950	54,52%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	29.164.300	1.145.500	3,93%
	Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen	30	32	106,67 %	5.940.400	4.373.600	73,62%

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Perangkat Daerah	hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	Dokumen				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi/teknis perkantoran	100 %	100 %	100 %	7.963.105.045	7.221.398.092	90,69%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100 %	6.778.346.446	6.175.517.498	91,11%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah petugas kebersihan	3 Orang	3 Orang	100 %	1.170.990.000	1.032.111.994	88,14%
		Lamanya penyediaan anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran	13 Bulan	13 Bulan	100 %			
		Lamanya penyediaan jasa pejabat pengadministrasian keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100 %			
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen keuangan akhir	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2.668.600	2.668.600	100%

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tahun yang disusun sesuai ketentuan	n					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semesteran yang disusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	11.100.000	11.100.000	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Seluruh aparatur lulus dalam mengikuti bimtek/pelatihan	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase nilai indeks kepuasan masyarakat	100 %	100 %	100 %	293.616.048	213.777.569	72,81%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lamanya penyediaan instalasi komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %	7.292.600	6.620.400	90,78%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lamanya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	18.395.000	10.395.900	56,51%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	12 Bulan	12 Bulan	100 %	13.344.000	11.340.000	84,98%

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
		undangan						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lamanya penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %	254.584.448	185.421.269	72,83%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	305.730.700	272.123.463	89,01%
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeuleur kantor	3 Buah	3 Buah	100 %	44.477.600	44.227.545	99,44%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gendung kantor	26	26	100 %	261.254.100	227.895.918	87,23%
		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	1	100 %			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	100 %	235.747.063	184.958.878	78,46%

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Daerah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lamanya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100 %	136.199.863	111.763.538	82,06%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lamanya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100 %	99.547.200	73.195.340	73,53%
		Lamanya penyediaan makanan dan minuman						
		Lamanya penyediaan peralatan peralatan dan perlengkapan kantor						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	98,33%	98,33%	391.275.100	227.053.374	58,03%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Lamanya pemeliharaan mobil jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100%	38.990.000	9.929.563	25,47%

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang diperpanjang izinnya	36 Buah	33 Buah	91,67%	235.760.000	154.132.891	65,38%
		Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	66.025.000	33.818.720	51,22%
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 Kegiata n	1 Kegiatan	100%	50.500.100	29.172.200	57,77%
TOTAL BELANJA LANGSUNG (UTAMA)						1.314.487.700,00	907.140.780	69,01%
BELANJA LANGSUNG (PENDUKUNG)						2.499.173.411	1.989.537.228	80%

No	Saaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
					(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG (PENDUKUNG)						6.778.346.446,00	6.175.517.498	91,11%

Sumber Data : Laporan Fisik dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2021

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 5 (lima) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%.

Berdasarkan tabel di bawah ini efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yaitu :

1. Sasaran meningkatnya kepatuhan membayar pajak daerah dengan indikator persentase capaian pendapatan asli daerah, dengan capaian kinerja sebesar 108,40 % dan penyerapan anggaran sebesar 69,01 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 30,1 %.
 - a. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 84,21 % dan penyerapan anggaran sebesar 47,65 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 52,35 %
 - b. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan penyerapan anggaran sebesar 92,61 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 7,39 %
 - c. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 88,24 % dan penyerapan anggaran sebesar 87,96 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 12,04 %
 - d. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 129,52 % dan penyerapan anggaran sebesar 30,19 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 69,81 %
 - e. Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mempunyai dua indikator capaian kinerja indikator pertama sebesar 100 %, capaian kinerja indikator kedua sebesar 137,27 % dan penyerapan anggaran sebesar 86,95 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 13,05 %
 - f. Penetapan wajib pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan penyerapan anggaran sebesar 98,11 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,89 %
 - g. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 83,93 % dan penyerapan anggaran sebesar 22,53 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 77,47 %

- h. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan penyerapan anggaran sebesar 100 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0 %
- i. Penagihan pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 121,05 % dan penyerapan anggaran sebesar 96,56 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 3,44 %
- j. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah dengan capaian kinerja sebesar 101 % dan penyerapan anggaran sebesar 80,51 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 19,49 %
- k. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan penyerapan anggaran sebesar 82,73 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 17,27%
- l. Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya dengan capaian kinerja sebesar 126,67 % dan penyerapan anggaran sebesar 82,02 %, sehingga diperoleh tingkat efisiensi sebesar 17,98%

Tabel 3.9
Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Saaran Strategis/Sas aran Program/Kegi atan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyera pan Anggara n	Tingkat Efisien si (%)
1	2	3	4	5	6 =(100%) -Kol 5
1.	Meningkatnya kepatuhan membayar pajak daerah	Persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD)	108,40	69,01	30,1
a	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah rapat koordinasi terkait hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah	84,21	47,65	52,35
b	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah	100	92,61	7,39
c	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut	88,24	87,96	12,04
d	Pengolahan, pemeliharaan,	Jumlah wajib pajak PBB yang	129,52	30,19	69,81

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6 = (100%) - Kol 5
	dan pelaporan basis data pajak daerah	diverifikasi			
e	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah lokasi yang ditetapkan ZNT	100	86,95	13,05
		Jumlah BPHTB yang baru	137,27		
f	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi	100	98,11	1,89
g	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih	83,93	22,53	77,47
h	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah buku laporan pendapatan daerah yang disusun	100	100	0
i	Penagihan pajak daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah yang bisa ditagih	121,05	96,56	3,44
j	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi	101	80,51	19,49
k	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun	100	82,73	17,27
l	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer	126,67	82,02	17,98

No	Saaran Strategis/Sas aran Program/Kegi atan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyera pan Anggara n	Tingkat Efisien si (%)
1	2	3	4	5	6 =(100%) -Kol 5
	perimbangan dan dana transfer lainnya				

Sumber Data : Laporan Fisik dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2021

3. C.1 Tindak lanjut atas evaluasi laporan kinerja Tahun 2021

3.C.1.1. Evaluasi kinerja Tahun 2021

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap laporan kinerja Bapenda Banjar tahun 2021 memperoleh nilai 78,42 dengan interprestasi predikat BB (Baik Sekali). Adapun perbedaan penilaian kinerja Bapenda dari tahun lalu dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Hasil Evaluasi Kinerja Bapenda

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,88	24,19
b.	Pengukuran Kinerja	25	17,19	19,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,12	13,38
d.	Evaluasi Internal	10	5,27	7,35
e.	Capaian Kinerja	20	16,38	14,13
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,84	78,42
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber Data : Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020

Maka pada tahun 2020 direkomendasikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, PK, dan Rencana Aksi, namun masih terdapat pelaksanaan perencanaan kinerja yang belum diimplementasikan seperti target kinerja pada dokumen renja belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja;

2. Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal namun IKU belum dimanfaatkan kedalam dokumen penganggaran;
3. Laporan kinerja sudah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome namun laporan kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*;
4. Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya namun tidak terdapat analisa pencapaian kinerja terhadap pemantauan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang telah dilakukan.

C.1.2 Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menjadikan dokumen renja sebagai pedoman dalam penyusunan perjanjian kinerja;
2. Dalam penyusunan dokumen penganggaran untuk mencantumkan IKU perangkat daerah;
3. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dapat dijadikan dasar penilaian dalam pemberian *reward* dan *punishment*;
4. Menyajikan analisa untuk capaian kinerja pada pemantauan rencana aksi;

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar yang tertuang dalam dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Banjar yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp.212.958.509.185,00 terealisasi Rp. 216.995.746.019,00 dengan persentase capaian sebesar 5,22 % dengan kategori nilai berhasil;
2. Capaian indikator program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar antara lain :
 - Persentase capaian penerimaan pendapatan asli daerah dengan target Rp.212.958.509.185,00 dan realisasi Rp. 216.995.746.019,00 dengan persentase capaian sebesar 101,90% dengan kategori berhasil;
3. Capaian serapan anggaran tahun 2021 antara lain :
 - Belanja dengan target 100% terealisasi 85,65% dengan persentase capaian sebesar 85,65% dengan kategori cukup berhasil;
 - Belanja untuk program dan kegiatan utama dengan target 100% terealisasi 69,01% dengan persentase capaian sebesar 69,01% dengan kategori kurang berhasil;
 - Belanja untuk program dan kegiatan pendukung dengan target 100% terealisasi 88,01% dengan persentase capaian sebesar 88,01% dengan kategori cukup berhasil.

4.2 SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intens kepada instansi-instansi terkait dalam penerimaan PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
2. Menindaklanjuti usulan ke BKDPSDM terkait diklat juru sita, penilai dan pemeriksa pajak;
3. Mengoptimalkan pembayaran pajak secara online melalui Bank Kalsel dan seluruh *payment point* ;
4. Penyisiran terhadap subjek dan objek pajak serta penyuluhan tentang kepatuhan pembayaran pajak serta perizinannya, dilaksanakan secara turun kelapangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2021